

**Politik Representasi Identitas Papua
Dalam Bingkai Pemberitaan Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat***

Maulana Andinata Dalimunthe
Universitas Sumatera Utara,
maulanaandinatad@usu.ac.id

Abstrak

Dinamika konstruksi terhadap identitas Papua sebagai the other merupakan proses politik representasi yang dilakukan oleh media. Konsep representasi tidak sekedar memproduksi atau menampilkan kembali sesuatu dihadapan khalayak, tetapi melalui beragamannya konsep representasi menghadirkan maksud tertentu kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana representasi identitas etnis Papua dalam bingkai pemberitaan surat kabar Kedaulatan Rakyat. Metodologi yang digunakan pada tulisan ini ialah metode kualitatif, dengan mengkaji secara komprehensif teks media dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan, memahami, dan menginterpretasi data-data yang diperoleh melalui media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedaulatan Rakyat semestinya bebas dari berbagai intervensi elit, dan membuka ruang bagi orang-orang Papua untuk menyampaikan aspirasi dan argumentasi mereka sendiri, tanpa diwakilkan oleh sudut pandang atau perspektif lainnya, seperti pihak kepolisian ataupun militer. Negara semestinya juga turut berperan serta dalam menjaga kondusifitas dan keadilan di antara berbagai identitas dan etnisitas yang ada di Indonesia, dengan tidak mendudukan kelompok Papua atau kelompok minoritas sebagai objek kebijakan atau kepentingan mereka

Kata kunci: Kedaulatan Rakyat, Representasi, Papua

Pendahuluan

Terdapat berbagai pendapat terkait keragaman etnis yang ada di Indonesia. Hildred Geertz (1967) misalnya, Ia menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 300 suku tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia, dan masing-masing dari suku tersebut memiliki ciri-ciri dan keunikan tersendiri, di antaranya ialah bahasa, kebiasaan, hingga identitas kultural (Geertz, 1967). Keberadaan kelompok-kelompok ini pula yang secara implisit mendorong identitas Indonesia sebagai sebuah negara yang multi etnis, multikultur, dan multi agama, yang keseluruhannya merupakan pondasi untuk membangun sebuah negara multikultur yang besar. Namun, keberagaman ini apabila tidak dirawat dan tidak dipelihara dengan baik, dapat menjadi bumerang yang justru berdampak pada disintegrasi dan perilaku rasisme terhadap kelompok atau identitas budaya yang minoritas.

Hal demikian salah satunya dapat dilihat melalui keberadaan suku bangsa Papua yang kerap kali diidentikkan dengan perbedaan kultur dan perbedaan fisik atau biologis dengan suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia. Papua pada umumnya didefinisikan dalam kaitannya dengan ciri-ciri fisik, namun pada dasarnya pembentukan identitas Papua dikonstruksikan melalui beberapa cara. *Pertama*, identitas Papua dibangun melalui kaca mata politis. Sejak Papua diintegrasikan dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) melalui *Act of Free Choice* tahun 1969 secara absah Papua memasuki kontrak sosialnya dengan Indonesia dan dengan sendirinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, penggabungan Papua dilakukan melalui proses *voting* yang rawan gugatan karena beberapa pihak masih mempermasalahkan hasil dari *Act of Free Choice*. *Kedua*, identitas Papua dibangun melalui pendekatan sosio-kultural. Secara rasial, masyarakat Papua tidak berasal dari ras yang sama dengan kelompok etnis Indonesia lainnya seperti etnis Melayu, karena Papua termasuk dalam ras Melanesia, yang menempati sebuah pulau di bagian paling timur dari wilayah geografis Indonesia. Sebagian besar orang Papua beragama Nasrani. Identitas sosio-kultural ini menjadi stigma yang melekat sebagai pembeda antara orang-orang Papua dengan orang-orang Indonesia lainnya. Identitas sosio-kultural lain yang melekat pada rakyat Papua adalah kehidupan yang masih dianggap primitif. Kondisi ini lebih disebabkan karena faktor isolasi geografis beberapa wilayah pedalaman Papua sehingga masih terdapat rakyat dengan penampilan demikian (Wardhani, 2016) .

Konstruksi identitas yang demikian berimplikasi pada stigmatisasi bahwa orang Papua adalah mereka yang berasal dari pulau Papua, berpenampilan fisik Melanesia, beragama Nasrani, bergaya hidup hidup terbelakang, dan masih mempermasalahkan keberadaannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadaan seperti ini pula yang kerap kali membuat suku Papua cenderung dipandang sebelah mata, dan tidak jarang menerima perilaku diskriminatif dari kelompok budaya lainnya. Salah satu tindakan diskriminatif yang mendera para pelajar asal Papua terjadi ketika para pelajar Papua berencana mencari rumah kos untuk tempat tinggal sementara mereka di Yogyakarta. Salah seorang mahasiswa Papua menyebutkan bahwa dirinya amat kesulitan mencari kamar kos, meskipun banyak rumah kos yang kosong. Ia meyakini hal ini diakibatkan keberadaannya sebagai pendatang asal Papua. Emanuel Gobay (31), salah seorang putra Papua yang sudah sepuluh tahun tinggal di Yogyakarta bahkan menilai masalah diskriminasi terhadap kelompok mereka semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut Gobay menilai alasan yang melatar belakangi perilaku diskriminatif terhadap kelompoknya lebih dikarenakan faktor warna kulit dan rambut keriting yang pada umumnya menjadi ciri khas orang-orang Papua. Perlakuan

diskriminatif terhadap pelajar-pelajar asal Papua juga terjadi ketika mereka tengah menggelar aksi damai terkait “hak menentukan nasib sendiri Papua Barat”. Juru bicara Persatuan Rakyat Pembebasan Papua Barat, Roy Karoba menyebutkan, ketika aksi tersebut berlangsung beberapa ormas antisparatis memperlakukan mereka dengan kurang manusiawi, karena ormas tersebut melempar, dan meneriakkan kata-kata yang bernada negatif (cacian) kepada mahasiswa Papua, serta kondisi ini dibiarkan oleh polisi yang berjaga-jaga di sekitar asrama (Atmasari:2016). Tindakan diskriminatif yang diterima oleh pelajar Papua di Yogyakarta tidak hanya didasarkan pada ciri fisik mereka, tetapi juga dibentuk oleh konstruksi media, melalui pemberitaan-pemberitaan yang kerap kali menampilkan sisi negatif dari orang-orang Papua.

Dinamika konstruksi terhadap identitas Papua sebagai *the other* merupakan proses politik representasi yang dilakukan oleh media. Konsep representasi tidak sekedar memproduksi atau menampilkan kembali sesuatu dihadapan khalayak, tetapi melalui beragamnya konsep representasi menghadirkan maksud tertentu kepada masyarakat. Media sebagai agen informasi (*knowledge*) memiliki sebuah makna yang mengkonstruksi sesuatu, dalam hal ini identitas Papua. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis ingin mengetahui lebih jauh politik representasi identitas Papua dalam bingkai pemberitaan *Kedaulatan Rakyat*.

Metodologi

Tulisan ini akan dibedah dengan menggunakan metode kualitatif interpretatif. Metode kualitatif interpretatif mengkaji secara komprehensif teks media dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan, memahami, dan menginterpretasi data-data yang diperoleh melalui media (Schatzman, Dalam Creswell, 2010: 298). Korpus penelitian ini adalah teks-teks berita surat kabar *Kedaulatan Rakyat* yang membahas isu-isu mengenai kelompok etnis Papua. Teks-teks berita yang menjadi data dalam penelitian ini tidak terbatas pada satu isu, namun dilihat melalui berbagai isu yang di dalamnya menyinggung isu Papua, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Pembahasan

Identitas Etnis Papua dalam Perspektif Sosial-Budaya

Menurut Hall (2013: 1-3), representasi menghubungkan makna dan bahasa pada budaya. Representasi bagi Hall, merupakan produksi makna yang terdapat di dalam konsep mental manusia melalui bahasa. Melalui representasi, suatu makna diproduksi dan dipertukarkan, sehingga representasi adalah salah satu cara guna memproduksi makna. Representasi bekerja melalui sistem representasi, dan sistem representasi ini terdiri dari dua komponen penting, yakni; konsep mental (pikiran) dan bahasa. Kedua komponen ini saling berkaitan. Konsep yang kita miliki mengenai sesuatu hal dalam pikiran kita membuat kita dapat mengetahui makna terhadap hal tersebut, namun makna

tersebut tidak dapat kita komunikasikan tanpa adanya bahasa. Misalnya, kita mengenal dan mengetahui konsep “Rumah”, tetapi kita tidak akan mampu mengkomunikasikan makna dari “rumah” (benda yang digunakan oleh orang-orang untuk menetap atau tinggal pada suatu tempat) tanpa mengungkapkannya melalui bahasa yang dimengerti oleh orang lain.

Stuart Hall menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan representasi (2013: 10-11). *Pertama* pendekatan reflektif, yang melihat makna dari objek manusia, gagasan, atau kejadian yang ada di dalam dunia nyata. Dalam pendekatan ini bahasa berguna sebagai cermin untuk merefleksikan makna sebenarnya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, pendekatan Intensional, yang melihat bahwa makna dari sebuah objek berasal dari penulis atau pembuatnya. Dalam hal ini, penulis berperan penting menentukan makna melalui bahasa yang mengacu pada aturan, kode, dan kesepakatan yang ada dalam suatu budaya. *Ketiga* pendekatan konstruksionis, yang mana makna digunakan untuk merepresentasikan konsep tertentu dalam masyarakat. Masyarakat dapat menentukan maknanya sendiri berdasarkan budaya dan sistem representasi yang mereka miliki, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan budaya.

Identitas seseorang pada dasarnya bersumber dari dua hal (Maalouf, 2003). *Pertama*, Identitas merupakan suatu entitas yang diturunkan atau diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warisan ini mencakup budaya atau sosio-kultural yang menjadi ciri-ciri suatu budaya tertentu. Ciri-ciri ini seperti; kebiasaan budaya, nama marga atau keluarga, kepercayaan, adat, nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Pencirian kultural ini (baik pada tataran material maupun tataran abstrak atau konsepsional) diterima sejak manusia tumbuh dari kecil. Manusia lahir sebagai individu dengan latar belakang etnik tertentu. Meskipun ilmu sosial kontemporer menyebutkan bahwa identitas etnik adalah rekonstruksi yang dihasilkan melalui agenda sosial, politik dan ekonomi, individu tentunya tidak akan lepas dari identitas diri yang diterimanya sejak lahir.

Selain itu, keterkaitan di antara genetis (tampilan fisik), dengan latar belakang kultural (kebiasaan, nilai, norma) mengandaikan relasi timbal balik antara identitas diri dan etnisitas yang dikonstruksi dengan tanah kelahiran (*homeland*). Toft (2003) menyebutkan bahwasanya rasa kepemilikan terhadap tanah kelahiran tidak dapat dipisahkan dari pemahaman seseorang, mengenai siapa dirinya dan berasal dari mana dirinya. Oleh sebab itu, perlawanan kerap dilakukan sekelompok orang apabila ditemukan pihak-pihak di luar kelompok mereka memiliki hasrat untuk menduduki atau menguasai secara semena-mena tanah kelahiran atau teritori di mana identitas mereka berasal.

Kedua, identitas dipahami berdasarkan keinginan seseorang untuk menentukan pencirian lain yang ingin dia aplikasikan atau terapkan. Pencirian semacam ini bersumber dari berbagai macam bentuk identitas diri pihak lain yang berada di sekitar kita, dan melengkapi identitas genetis-kultural yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks masyarakat plural, seseorang akan dihadapkan dengan berbagai bentuk wujud identitas dan etnisitas, sehingga mau tidak mau mereka diharuskan untuk berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang budaya dan gaya hidup yang beragam. Bentuk interaksi seperti ini dapat dilihat melalui proses asimilasi maupun adaptasi budaya. Identitas seseorang tidak hanya dilihat melalui keterangan yang ada pada kartu pengenal, sebab Identitas berkaitan dengan keberadaan seseorang yang memiliki keunikan yang khas. Keunikan dan khas tersebut tidak hadir secara ilmiah dan muncul begitu saja, namun melalui proses identifikasi genetis, kultural dan sosial yang berlangsung selama hidup mereka.

Masyarakat Papua menerima keotentikan diri mereka baik dari leluhur mereka maupun dari identifikasi genetis-kultural dan psiko-sosial, yang mengacu pada unsur-unsur budaya eksternal yang mereka terima. Kompleksitas identifikasi tersebut menghasilkan ciri khas dan keunikan identitas diri pada orang-orang Papua, dibandingkan dengan suku lainnya yang ada di Indonesia. Dalam melihat dan memahami keunikan identitas diri genetis-kultural dan psiko-sosial orang-orang Papua, kita perlu mencermati bagaimana konsepsi identitas-diri orang Papua direkonstruksi, baik oleh orang Papua itu sendiri, oleh suku-suku lain di Nusantara, dan bahkan oleh media sebagai pihak eksternal. Konsepsi terhadap identitas-diri orang Papua merupakan salah satu rekonstruksi dalam sejarah nusantara yang telah menjalani proses panjang, yakni semenjak zaman kerajaan kuno, masa kolonisasi nusantara, dan masa Indonesia merdeka. Pada masa kolonisasi misalnya, identitas orang papua sebagai salah satu etnik nusantara ditinjau melalui rekonstruksi pemerintah kolonial (Djunatan, 2013).

Konstruksi Identitas Papua Dalam Bingkai Pemberitaan *Kedaulatan Rakyat*

Melihat situasi di Papua saat ini, media menjadi alat para elit guna mengejar kepentingan yang mereka inginkan, sehingga media melenceng dan mengabaikan visi-misi serta independensi yang mereka gaungkan. Tidak sedikit media yang sudah terkontaminasi dan terjerumus ke dalam praktik kepentingan kelompok elit tertentu. Dengan demikian, ruang aspirasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui media dalam ruang demokrasi dibungkam, tidak terkecuali orang-orang Papua. Kelompok elit dengan berbagai sumber daya yang mereka miliki, dengan sangat mudah mengintervensi media, baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal. Kegagalan media dalam memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan Papua adalah minimnya atau bahkan sama sekali tidak dibukanya ruang atau rubrik bagi masyarakat Papua,

khususnya masyarakat akar rumput (*grassroot*) untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kebanyakan pekerja media secara dominan meliput berita dari perspektif para elit, seperti pejabat di lembaga negara, maupun pihak otoritas keamanan negara. Praktik seperti ini semakin menutup ruang aspirasi orang-orang Papua, karena para awak media tidak mendengarkan argumentasi mereka yang secara langsung menjadi bagian atau bahkan objek dari sebuah produk pemberitaan media. Dengan demikian, media secara eksplisit telah membungkam aspirasi masyarakat Papua.

Pemberitaan mengenai Papua khususnya yang berkaitan dengan isu separatisme semakin menguat, dan masih menjadi porsi utama *Kedaulatan Rakyat* dalam menghadirkan isu Papua. Salah satu isu yang hangat diperbincangkan oleh media ialah penyerangan kelompok Papua, yang oleh pihak kepolisian disebut sebagai kelompok separatis. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa kelompok separatis ini bahkan melakukan penembakan dan menyandera orang-orang Papua di kampung Kimbeli dan Banti, Timika. Hal ini pula yang memantik Negara melalui beberapa pihak terkait, seperti TNI dan POLISI untuk melakukan perlawanan balik guna meredam tindakan yang dilakukan kelompok separatis tersebut. Namun yang patut disayangkan adalah pemberitaan media belum mampu menjadi katalisator atau medium dalam menengahi konflik yang tengah berlangsung.

Pemberitaan *Kedaulatan Rakyat* tentang Papua masih cenderung menyudutkan kelompok etnis Papua. Dalam hal ini, dan media massa melalui pemberitaannya malah ikut menyuburkan stigmatisasi separatis terhadap Papua. Media massa belakangan ini seakan-akan juga membenarkan bahwa pelaku kekerasan di Papua adalah orang Papua, padahal belum terbukti secara hukum. Media dalam hal ini malah menjadi semakin bebas, dan ikut ambil bagian dalam menguatkan wacana bahwa Papua adalah kelompok yang keras dan selalu diidentikkan dengan konflik.

Media secara tidak langsung menjadi agen yang malah mereproduksi *stereotype* terhadap kelompok Papua. *Stereotype* dapat dilihat melalui tiga hal (Hall, 2013: 247-248), yakni; *Pertama*, *stereotype* me-reduksi, meng-esensialisasikan, me-naturalkan, dan menetapkan perbedaan. Kelompok Papua direduksi oleh media sebagai kelompok yang marginal, dan menetapkan perbedaan tersebut dengan berbagai cara. *Kedua*, *stereotype* pada praktiknya tertutup dan eksklusif. Dalam hal ini, kelompok Papua dieksklusi dan tidak diberikan ruang oleh media untuk menyampaikan suara mereka secara langsung, sebab kerap diwakilkan oleh elit tertentu, seperti kepala daerah atau pihak kepolisian. *Ketiga*, *stereotype* cenderung berlangsung di mana ada ketidaksetaraan kuasa (*inequalities of power*). Perilaku Media yang seperti ini juga menguatkan anggapan ironi demokrasi pada praktik media yang seakan-akan menjadi agen populer dalam

menguatkan atau mereproduksi wacana-wacana tertentu, dalam hal ini isu etnisitas Papua.

Tindakan media yang mereproduksi *stereotype* kelompok Papua dapat dilihat melalui pemberitaan media mengenai kasus teror dan kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat Timika, khususnya di perkampungan Kimbeli dan Banti. Pemerintah melalui Polisi dan TNI menganggap kelompok yang melakukan hal tersebut adalah separtisme kemerdekaan Papua, yang diindikasikan dapat mengancam stabilitas negara. Padahal, pihak Polisi dan TNI belum melakukan konfirmasi secara langsung kepada kepala adat atau penduduk di sekitar Kimbeli dan Banti, apakah mereka merasa disandra atau disudutkan oleh kelompok yang dianggap separatis. Pihak kementerian negara (Polisi dan TNI) ibarat “bersimbiosis mutualistik” dengan media guna menguatkan wacana yang mereka bangun terhadap Papua. Perspektif polisi kerap dijadikan bahan bagi institusi media dalam menyampaikan pemberitaan yang berkaitan dengan Papua. Ketika memberitakan Papua, pihak wartawan cenderung menunggu informasi dari pihak kepolisian atau TNI. Setelah mereka memperoleh informasi yang mereka inginkan, Para wartawan ini tidak melakukan apa yang sebelumnya disebut *check and balance*. Seperti yang diungkapkan oleh Victor mambor (Dalam, Rasiey, 2017).

“Informasi dari aparat keamanan tanpa diuji kebenarannya, langsung dijadikan berita. Ini kan tidak benar dalam membuat sebuah berita, terutama jika itu berkaitan dengan konflik,”

Pekerja media menganggap apa yang disampaikan kepolisian adalah informasi paling “benar” dan sudah mewakili apa yang tengah berlangsung di Papua, sehingga mereka menganggap tidak lagi diperlukan *crosscheck* pada pihak-pihak yang dituduh sebagai pelaku kekerasan yang notebene adalah orang Papua. Jika sudah begini, pemberitaan-pemberitaan yang acap kali disampaikan oleh media amat bias dengan penguasa, khususnya otoritas kementerian negara. Hampir semua aspek sosial produksi berita media memiliki kondisi dan konsekuensi epistemik. Dengan demikian, publik memperoleh wawasan atau pengetahuan (*knowledge*) mengenai aspek kognitif dan interaksional dari produksi pengetahuan tentang dunia, melalui aspek relasional antara institusi media (jurnalis dan elit media) dan elit institusi lainnya (Dijk, 2014).

Praktik semacam ini pula yang semakin menegaskan keberadaan media sebagai corong kepentingan kelompok elit tertentu, sehingga semakin menghapuskan ruang aspirasi orang-orang Papua di media. Pekerja media seharusnya bertindak seimbang dengan mencoba mencari informasi pembanding di luar perspektif kepolisian, guna mengetahui kebenaran peristiwa yang sesungguhnya. Media kerap kali mengacuhkan perspektif lain yang semestinya dapat dijadikan penyeimbang pada sebuah produk pemberitaan. Media cenderung menganggap otoritas yang ada merupakan pihak yang paling memahami betul permasalahan yang terjadi. Seperti yang diungkapkan Victor

Mambor, ketua AJI Kota Jayapura, bahwa awak media sering kali menjadikan narasumber berita adalah otoritas sipil maupun keamanan saja, seperti Pejabat Polisi, Pejabat TNI, Gubernur, Kepala Dinas, Bupati, Anggota DPRP/DPRD serta elit di Papua lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Van Dijk (1993), bahwa penjelasan isi dan struktur laporan berita mengenai urusan etnis harus dilihat melalui proses sosial dan kognitif yang terlibat dalam produksi berita. Khususnya hubungan dengan institusi elit lainnya yang diimplementasikan pada tahap atau proses komunikasi (sosial dan kognitif). Pendidikan jurnalis, *newsgathering*, kontak dengan narasumber, pertemuan editorial, sosialisasi dan profesionalisasi jurnalis, termasuk di antara banyak dimensi makro dan mikro dalam pembuatan berita yang berkaitan dengan urusan etnik. Pada saat yang bersamaan, aspek sosial ini terkait dengan aspek kognitif atau ideologis, seperti pengetahuan, kepercayaan, dan kognisi sosial jurnalis mengenai isu sosial, budaya, dan politik yang mereka tulis. Tidak hanya dengan siapa wartawan berbicara, siapa yang memiliki akses khusus pada media, siapa aktor berita yang dianggap penting dan cukup kredibel untuk benar-benar dikutip, siapa yang diizinkan memberikan pendapat mereka sendiri, tetapi juga bagaimana jurnalis tersebut mengevaluasi pendapat yang dikutip.

Pemberitaan-pemberitaan terhadap Papua merepresentasikan suasana mencekam dan genting yang terus berlanjut di tanah Papua, dan terus direproduksi melalui media. Berita sebagai produk media, dapat mengkonstruksi kognitif seseorang. Misalnya saat mendengar sebuah cerita mengenai kelompok etnis tertentu, seorang pendengar akan mengaktifkan informasi yang relevan dengan informasi yang mereka miliki tentang etnisitas tertentu. Informasi ini akan mencakup, baik pribadi maupun sosial, yakni, kontak langsung antara individu dengan kelompok etnis dan informasi yang diperoleh secara sosial dari sumber diskursif, seperti media. Meski tidak secara langsung diakui atau dikenali, informasi ini terus tertanam di tataran kognitif individu, sehingga memberikan kontribusi secara konseptual terhadap pengembangan *knowledge* dan *organization* (pengetahuan dan organisasinya) dalam mental model individu. Proses ini menjelaskan adanya hubungan antara antara wacana, kognisi, dan masyarakat. (Addison, 2013).

Foucault berpendapat bahwa konstruksi terhadap topik, berarti mendefinisikan dan menghasilkan objek pengetahuan kita. Hal ini mengatur cara agar topik dapat dibicarakan secara bermakna. Ini juga mempengaruhi bagaimana gagasan dipraktekkan dan digunakan untuk mengatur perilaku orang lain. Sebagai sebuah wacana, *rules in* berarti cara untuk mengerti atau memahami perkataan, tulisan, dan tingkah laku. Sedangkan *rules out* adalah batasan perkataan atau ujaran, dan tingkah laku dalam hubungannya dengan topik atau konstruksi pengetahuan. Foucault berpendapat,

discourse tidak pernah terdiri dari satu pernyataan, satu teks, satu tindakan atau satu sumber. Wacana yang sama, cara berfikir atau keadaan pengetahuan pada satu waktu (apa yang disebut Foucault dengan episteme), akan muncul di berbagai teks, dan sebagai bentuk perilaku, di sejumlah lokasi institusional yang berbeda dalam masyarakat. Keadaan ini kemudian dikatakan oleh Foucault sebagai “*discursive formation*”. Peristiwa diskursif ini mengacu pada objek yang sama, membagikan gaya yang sama dan dukungan strategi dari institusi umum, administratif atau konsep dan pola politik yang umum. Foucault tidak seperti teoritis konstruksionis lainnya, dia fokus kepada produksi pengetahuan dan makna, bukan melalui bahasa tapi melalui wacana (Dalam, Cousins & Hussain, 1984: 84-85).

Wacana terhadap Identitas Papua sebagai kelompok yang meresahkan dan berbahaya terus dimapankan melalui berbagai ranah formasi diskursif, dan media dalam hal ini menjadi salah satu wadah yang dimanfaatkan guna memapankan wacana tersebut. Media lagi-lagi tidak menghimpun atau mengutip pernyataan korban pemerkosaan secara langsung, sehingga kita tidak dapat mengetahui keabsahan berita tersebut. Hampir semua peristiwa yang berlangsung dan dialami oleh orang-orang Papua hanya menggunakan sudut pandang elit kepolisian. Kredibilitas informasi dan perspektif yang digunakan oleh *Kedaulatan Rakyat* menjadi semakin problematis. Media seharusnya menghadirkan perspektif atau narasumber berita yang tidak hanya berasal dari pihak keamanan negara, tetapi juga melalui masyarakat lokal. Memang diakui cukup sulit untuk mengakses narasumber berita selain aparat kewanitaan, namun hal ini merupakan tugas para awak media (wartawan), mengingat tanggung jawab yang mereka emban guna memenuhi standar berita, serta kredibilitas sebuah media.

Dalam cakupan etnik secara global, kita dapat memeriksa suara atau jangkauan yang dimiliki etnis minoritas dibandingkan dengan aktor berita kulit putih pada ruang media. Jika minoritas dikutip sama sekali, pendapat mereka hampir selalu diimbangi dengan pembicara kulit putih. Sebagai contoh, hanya 3,8% laporan berita di Inggris yang memperbolehkan kelompok minoritas untuk berbicara mengenai isu etnisitas (Dijk, 1993). Contoh kasus ini lagi-lagi memberikan pemahaman kepada kita bagaimana posisi atau ruang yang diberikan oleh media kepada kelompok minoritas yang masih jauh dari kata berimbang. Teks yang diproduksi oleh media masih didominasi oleh wacana para elite, dalam hal ini otoritas negara. Baik dalam tataran nasional maupun internasional, Media kerap dieksploitasi oleh negara guna menjalankan kontrol taksonomi atas perbedaan (Appadurai, 1991).

Seperti yang diungkapkan oleh Van Dijk (1993), bahwa Kehadiran kelompok minoritas yang dianggap berbeda (*the others*), secara semantik didefinisikan dalam wacana berita yang berbeda, bermasalah, menyimpang, atau mengancam, sehingga

peristiwa atau isu etnisitas cenderung dikonstruksi sedemikian rupa sehingga tindakan negatif mereka, seperti, kekerasan, mendapat porsi utama dan didiskusikan, namun kemungkinan penjelasan sosial tentang konflik etnis seperti diskriminasi atau penyebab kemiskinan, tidak disebutkan dalam laporan berita.

Kesimpulan

Kedaulatan Rakyat menjadi agen yang secara tidak langsung ikut ambil bagian dalam merepresentasikan dan mereproduksi diskriminasi, serta stereotipe terhadap identitas Papua melalui pemberitaan-pemberitaan yang mereka sampaikan kepada publik. Wacana terhadap Identitas Papua sebagai kelompok yang meresahkan dan berbahaya terus dimapankan melalui berbagai ranah formasi diskursif, dan media dalam hal ini dimanfaatkan guna memapankan wacana tersebut. Melalui penggunaan bahasa sebagai sistem simbol, para pengelola media mampu menciptakan, memelihara, mengembangkan, dan bahkan meruntuhkan realitas. Ketika menikmati suatu informasi dari media, terkadang tanpa sadar penonton/pembaca digiring oleh definisi yang ditanamkan oleh media.

Di samping itu, bahasa digunakan sebagai alat bagi penguasa untuk melegitimasi *power* yang mereka miliki untuk diterapkan pada kelompok minoritas. Hal ini semakin subur sebab diproduksi serta dikonstruksi secara terus menerus melalui media. Politik representasi media dilihat melalui proses pembentukan sebuah teks yang ditampilkan pada sebuah berita. Teks yang ditampilkan pada kenyataannya tidak menggambarkan fenomena yang sebenarnya, sebab berita telah mengalami filterisasi dari berbagai bentuk kepentingan para elit. Peristiwa atau isu yang berkaitan dengan identitas Papua dikonstruksi sedemikian rupa sehingga tindakan negatif mereka, seperti, kekerasan, menjadi porsi utama dan didiskusikan terus menerus, namun yang patut disayangkan ialah penjelasan tentang penyebab kemiskinan dan kesenjangan sosial di tanah Papua, khususnya tidak disebutkan dan dibahas dalam laporan berita.

Kedaulatan Rakyat semestinya bebas dari berbagai intervensi elit, dan membuka ruang bagi orang-orang Papua untuk menyampaikan aspirasi dan argumentasi mereka sendiri, tanpa diwakilkan oleh sudut pandang atau perspektif lainnya, seperti pihak kepolisian ataupun militer. Negara semestinya juga turut berperan serta dalam menjaga kondusifitas dan keadilan di antara berbagai identitas dan etnisitas yang ada di Indonesia, dengan tidak mendudukan kelompok Papua atau kelompok minoritas sebagai objek kebijakan atau kepentingan mereka. Namun sebaliknya, Negara diharuskan membuka ruang sosial, ekonomi dan politik bagi orang-orang Papua, sehingga identitas Papua menjadi cair.

.Daftar Pustaka

- Addison, Maggie. (2013). *Mental models in discourse production: Atypical discourse and the role of event models in the narratives of depressed patients*. Carleton University: Ottawa.
- Atmasari, Nina. (2016). *Asrama Papua di Jalan Kusumanegara Masih Dijaga Ketat*. Harian Jogja. Archived: (<http://www.harianjogja.com/baca/2016/07/16/info-jogja-asrama-papua-di-jalan-kusumanegara-masih-dijaga-ketat-737867>) Diakses: 2 Desember 2016.
- Braithwaite, John. Cookson, Michael. Braithwaite, Valerie. & Dunn, Leah. (2010). *Non-truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding*. ANU Press: Australia.
- Cousins, M. dan Hussain, A. (1984) *Michel Foucault*, Macmillan: Basingstoke.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Dijk, Van. (1993). *Elite Discourse and Racism*. Sage Publications: London.
- _____ (2014). *Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach*. University Printing House: Cambridge.
- Djunatan, Stephanus. (2013). *Membawa Keadilan bagi Identitas-diri Orang Papua*. Universitas Katolik Parahyangan: Bandung.
- Geertz, Hildred. (1967). *Indonesian Culture and Communities*, dalam Ruth T. McVey, ed. *Indonesia, Southeast Asia Studies*. New Haven: Yale University, by arrangement with HRAF Press.
- Hall, Stuart. (2013). *Representation, Second edition*. Sage Publications: London.
- Maalouf, Amin. (2003). *In the Name of Identity, violence and the need to belong*. Penguin Books: New York.
- Portal Radio Suara Dogiyai. (2017). *Pemberitaan Tentang Papua Dinilai Diskriminatif*. Archived: (<http://radiosuaradogiyaifm.blogspot.co.id/2012/07/pemberitaan-tentang-papua-dinilai.html>) Diakses; 09 Desember 2017.
- Purba, Jhon (2017). *Selain Merampas Harta, Kelompok Kriminal di Papua Juga Perkosa Korban*. Archived: (<http://regional.kompas.com/read/2017/11/18/18202491/selain-merampas-harta-kelompok-kriminal-di-papua-juga-perkosa-korban>). Diakses: 10 Desember 2017.
- Putra, Putu M. (2017). *Menko Polhukam Ganti Nama Kelompok Bersenjata di Papua Jadi KKS*. Liputan 6. Archived: (<http://news.liputan6.com/read/3169651/menko-polhukam-ganti-nama-kelompok-bersenjata-di-papua-jadi-kks>). Diakses: 10 Desember 2017,
- Rasiey, Kyoshi. (2017). *Dewan Pers diminta usut media yang memberitakan penyanderaan di Papua*. Papua No. 1 News Portal | Jubi. Archived: (<https://tabloidjubi.com/artikel-11549-dewan-pers-diminta-usut-media-yang-memberitakan-penyanderaan-di-papua.html>) Diakses: 10 Desember 2017.
- Toft, Monica Duffy. (2003). *The Geography of Ethnic Violence: Identity, interest, and the indivisibility of territory*. Princenton University Press: Princenton.



Wardhani, Baiq. (2016). *Muslim Nuu Waar: (un)Common Identity Reconstruction in Papua, Indonesia*. Universitas Airlangga: Surabaya.